



LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

PKN II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER

**DALAM PENANGANAN KASUS ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DITRESKRIMUM POLDA GORONTALO**



SAHRUL, S.H. M.H.

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 LATAR BELAKANG

3 TUJUAN DAN MANFAAT

4 MILESTONE PROYEK PERUBAHAN

5 OUTPUT DAN OUTCOME

6 STRATEGI MARKETING

7 PENUTUP



KATA PENGANTAR

Dengan hormat,

Pada kesempatan ini, penulis dengan rendah hati menyajikan laporan Proyek Perubahan dengan judul "Kerjasama Ditreskrim Polda Gorontalo dengan Multi Stakeholder dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum." Laporan ini merupakan hasil dari partisipasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI) pada Angkatan XXXI tahun 2024.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo dengan Multi stakeholder (KPAI, Peksos, PK Bapas, UPTD PPA, Penasihat Hukum dalam penanganan kasus anak berhadapan hukum. Dalam laporan ini, penulis akan memaparkan secara komprehensif rencana perjalanan proyek yang akan dilaksanakan dalam waktu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah bersedia menjalin kolaborasi dan memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi dalam perancangan proyek ini. Utamanya bagi para mentor dan *coach* yang senantiasa terus memberikan masukan dan mendampingi proses perancangan proyek perubahan ini hingga terbentuknya laporan perancangan proyek yang telah disetujui.

Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dari laporan rancangan proyek perubahan ini, sehingganya penulis berharap untuk masukan dan bimbingan serta arahan lebih lanjut dari seluruh pihak. Besar harapan penulis agar proyek perubahan ini dapat menjadi rekomendasi bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang kesejahteraan sosial.



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

- GAKKUM YG DILAKS POLRI THD ABH SERINGKALI AKIBATKAN KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT
- ADANYA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM GAKKUM THD ABH
- DIPERLUKAN UPAYA-UPAYA GUNA MENINGKATKAN PROFESIONALISME POLRI DALAM PENANGANAN ABH

PERMASALAHAN

“BAGAIMANA GAKKUM DALAM PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA DITRESKRIMUM POLDA GORONTALO ?”

POKOK-POKOK PERSOALAN

1. BAGAIMANA KONDISI SDO DLM SIDIK ABH?
2. FAKTOR2 YG PENGARUHI DLM GAKKUM THD ABH?
3. BAGAIMANA MEKANISME SIDIK THD ABH ?

RUANG LINGKUP

TP YG LIBATKAN ABH SBG TSK MELIPUTI KASUS PENCURIAN, PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR, PENCABULAN, PENGANIAYAAN DAN PENGEROYOKAN

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan secara umum adalah meningkatkan kinerja Ditreskrim Polda Gorontalo dengan Multi Stakeholder dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum melalui pelayanan terpadu yang dirangkum dalam tiga tahap sebagai berikut:



Tujuan jangka pendek

- (a) Tercapainya komitmen antara anggota tim dan mitra kerja terhadap pelaksanaan proyek perubahan
- (b) Pemetaan kasus anak berhadapan dengan hukum
- (c) Pertukaran informasi dan data dengan stakeholder terkait
- (d) FGD (Forum Group Discussion)
- (e) Pembentukan SOP pelayanan kerjasama stakeholder dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum
- (f) Menyediakan pelayanan pendampingan kasus ABH melalui layanan pusat kritis



Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan dengan aktivitas sebagai berikut :

- (a) Evaluasi pelaksanaan proyek per bahan yang telah dilaksanakan pada tahap jangka pendek
- (b) Melakukan perbaikan hasil evaluasi tahap jangka pendek yang masih belum optimal



Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang yaitu dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun dengan aktivitas sebagai berikut:

- (a) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada jangka pendek dan jangka menengah
- (b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH berbasis digital yang di jalankan

TUJUAN DAN MANFAAT

Manfaat Manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari manfaat internal dan manfaat external sebagai berikut:



Internal

- Meningkatkan peran dan dampak positif dari masing-masing instansi pada stakeholder dalam proses penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum.
- Meningkatkan sinergitas kepolisian dengan stakeholder lainnya melalui komunikasi sosial
- memberikan kemudahan bagi Polda Gorontalo dan mitra kerja dalam manajemen penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum.



Eksternal

- memberikan kemudahan dan percepatan mendapat respon pelayanan pengaduan kasus ABH kepada polda Gorontalo.
- memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan memanfaatkan fasilitas sistem yang tersedia

Strengths

- o Adanya kewenangan diskresi kepolisian
- o Komitmen Polri untuk memberikan keadilan
- o Perkap Keadilan Restoratif
- o Adanya pengawasan dari lingkungan internal Polri.
- o Motivasi Penyidik untuk meningkatkan kinerja

Weaknesses

- o Belum adanya Perkap khusus yang mengatur
- o Sebagian penyidik Polri belum memahami RJ.
- o Masih terbatasnya alokasi anggaran.
- o Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik
- o Masih kurangnya kompetensi Penyidik

SWOT Analysis

Opportunities

- o Adanya ketentuan tentang Diversi
- o Perma tentang kondisi non hukum diluar proses peradilan.
- o Adanya dukungan dari KPAI
- o Adanya kesadaran hukum masyarakat
- o Dukungan dari akademisi hukum

Threats

- o Belum kesamaan pendapat penegak hukum
- o Sosialisasi implementasi RJ masih jarang
- o Kurangnya pengawasan pihak keluarga
- o Adanya advokat yang resisten
- o Adanya pihak yang skeptis

KONDISI IDEAL



SDM

- 1) KUANTITAS : PENYIDIK TERCUKUPI
- 2) KUALITAS : KNOWLEDGE : PEMAHAMAN PENYIDIK MENGENAI ATURAN-ATURAN HUKUM DAN PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN
- SKILL : PENGUASAAN KETRAMPILAN PENYIDIKAN
- ATTITUDE : PEMAHAMAN DALAM BERPERILAKU DALAM PROSES PENYIDIKAN

SDO

SARPRAS

- RUANGAN PENYIDIKAN :
- 1) TERDAPAT RUANGAN KHUSUS
- 2) KOMPUTER INVENTARIS DINAS;
- 3) DOKUMEN PENDUKUNG PROSES MEDIASI TERSEDIA
- 4) PERALATAN DOKUMENTASI TIDAK TERSEDIA.
- 5) TERSEDIANYA RUANGAN KHUSUS

METODE

- 1) SOP THD ABH TELAH TERSUSUN
- 2) TERBANGUN SISTEM
- 3) DOKUMEN PENDUKUNG MEMADAI
- 4) METODE MENGIKUTI POLA BAKU.
- 5) PENYIDIK DAPAT BERTINDAK IMPARSIAL
- 6) MENGACU PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

GAR

ALOKASI DANA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI TINDAKAN PENYELIDIKAN PENYIDIKAN KASUS PIDANA TERSEDIA/TERCUKUPI

IMPLIKASI

THD PROFESIONALISME POLRI : TUNGGAKAN KASUS; KINERJA POLRI TIDAK MAKSIMAL TANGANI KASUS; PENANGANAN KASUS TIDAK TRANSPARAN; THD KEPERCAYAAN MASY: ANGGAP POLRI KURANG SERIUS; ANGGAP POLRI TIDAK BERIKAN YANG TERBAIK & ABAIKAN KEADILAN ;KEPERCAYAAN MASY THD KINERJA POLRI KU

MEKANISME SIDIK

REN

- 1) TELAH TERSUSUNNYA RENCANA PENYIDIKAN
- 2) TARGET WAKTU SIDIK EFISIEN
- 3) PERS YG TANGANI TP SELURUH UNIT PPA
- 4) RENBUT SESUAI ALOKASI

ORG

PENANGANAN PENYIDIKAN DILAKUKAN TERPUSAT DI UNIT PPA

LAKS

PELAKSANAAN SIDIK DI RUANG SIDIK KHUSUS HAN DILAKS DI RUANG HAN KHUSUS

DAL

WAS SIDIK OLEH PERS UNIT PPA, KASI WAS,PROPAM

GAKKUM THD ABH

- A) DASAR : ATURAN HUKUM
- B) DELAKS SIDIK DILAKUKAN DI RUANG KHUSUS
- C) PELAKS DIVERSI DAN RJ
- D) PIHAK YANG DILIBATKAN : ANAK DAN ORANG TUA/WALINYA, KORBAN DAN/ATAU ORANG TUA/WALINYA, BAPAS, DAN TOKOH MASYARAKAT KEDUA PIHAK, INSKAIT

OUTPUT DAN OUTCOME

Output

Output yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah pelayanan penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di wilayah Provinsi Gorontalo dengan tersedianya tenaga penyidik yang profesional dan tim kerja yang solid akan berjalan dengan efektif dan

Outcome

Outcome dari proyek perubahan ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal umum dan stackholder dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di provinsi Gorontalo



KONDISI FAKTUAL

SDM

SDO

- 1) KUANTITAS : PENYIDIK DAPAT DIBERDAYAKAN
- 2) KUALITAS :
 - KNOWLEDGE : PEMAHAMAN PENYIDIK MENGENAI ATURAN ATURAN HUKUM DAN PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN
 - SKIL :PENGUASAAAAN SPESIALISASKETERAMPILAN PENYIDIKAN
 - ATITUDE :PEMAHAMAN BERPRILAKU DALAM PROSES PENYIDIKAN

SARPRAS

- 1) RUANGAN PENYIDIKAN : TERBATASNYA RUANGAN KHUSUS SIDIK ABH
- 2) KOMPUTER INVENTARIS DINAS;
- 3) DOKUMEN PENDUKUNG PROSES MEDIASI BELUM TERSEDIA
- 4) PERALATAN DOKUMENTASI TIDAK TERSEDIA.
- 5) BELUM TERSEDIA RUANGAN KHUSUS KONSELING

METODE

TIDAK ADANYA METODE BAKU YG KOMPREHENSIF BELUM ADANYA BATASAN YANG OBYEKTIF PENGAWAS INTERNAL JARANG DILIBATKAN

GAR

ALOKASI DANA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI TINDAKAN PENYELIDIKAN PENYIDIKAN KASUS PIDANA MASIH BELUM MEMADAI

IMPLIKASI

THD PROFESIONALISME POLRI : TUNGGAKAN KASUS; KINERJA POLRI TIDAK MAKSIMAL TANGANI KASUS; PENANGANAN KASUS TIDAK TRANSPARAN; THD KEPERCAYAAN MASY: ANGGAP POLRI KURANG SERIUS; ANGGAP POLRI TIDAK BERIKAN YAN TERBAIK & ABAIKAN KEADILAN ;KEPERCAYAAN MASY THD KINERJA POLRI KU

MEKANISME SIDIK

REN

- 1) TIDAK DISUSUNNYA RENC SIDIK SCR BAKU
- 2) TARGET WAKTU SIDIK MENGACU BATAS HAN
- 3) PERS YG TANGANI TP SELURUH UNIT PPA
- 4) BERBIAYA MAHAL KRN PERLUKAN AHLI

ORG

PENANGANAN SIDIK TIDAK DILAKUKAN TERPUSAT DI UNIT PPA, NAMUN BERDASARKAN TP

LAKS

PELAKSANAAN SIDIK DI RUANG SIDIK UMUM, HAN DI RUANG YG SAMA MESKI SEL TERPISAH

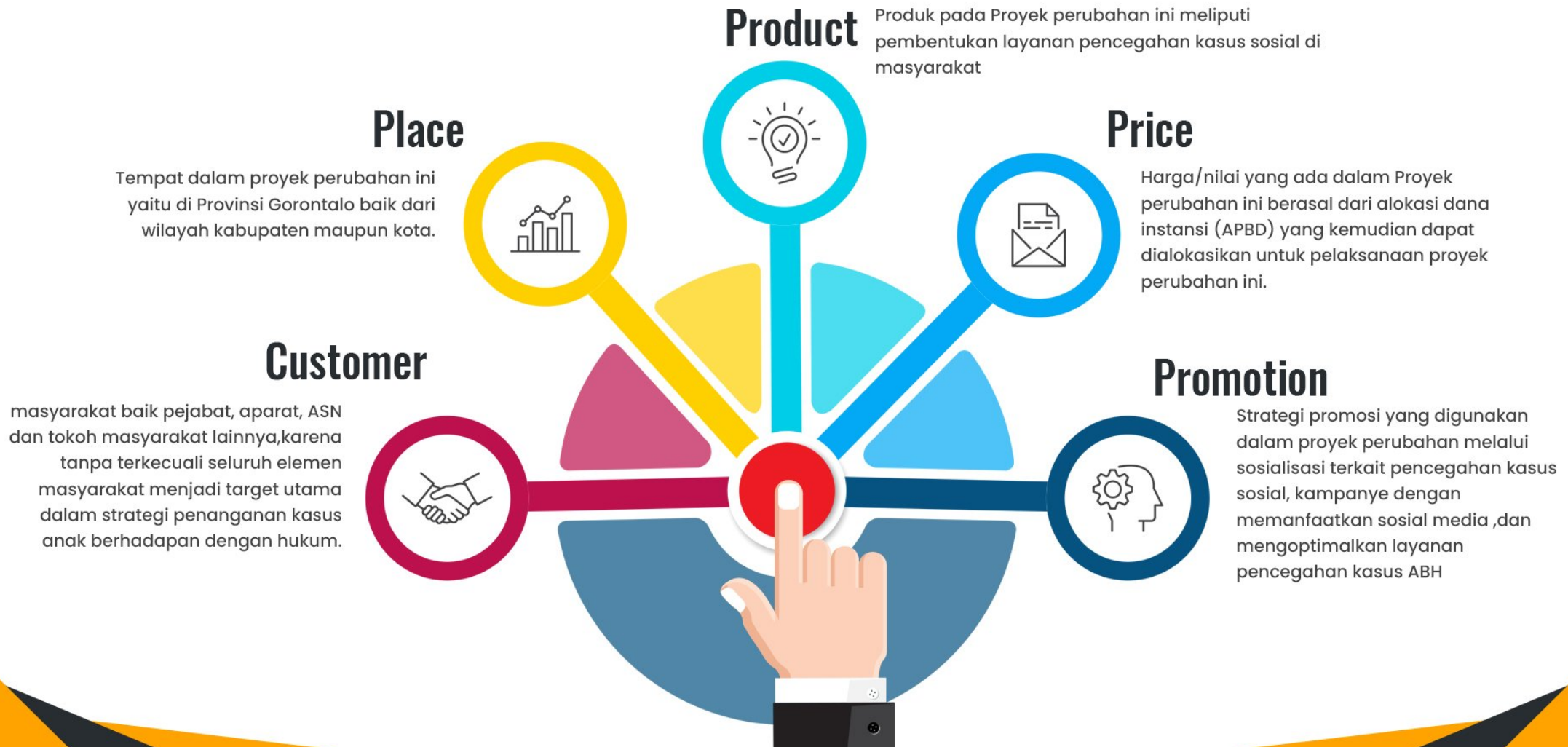
DAL

WAS SIDIK BAGWASSIDIK

GAKKUM THD ABH

- A) TDK CEPAT & BERBIAYA MURAH
- B) PERAN STAKEHOLDER MASIH BLM OPTIMAL;
- C) PENANGANAN ABH TINGGALKAN RESIDU SOSIAL
 - DIVERSI THD ABH BROKEN HOME
 - PENGAWASAN THD ABH
 - PENANGANAN ABH PASCA JUVENILE DELINQUENCE

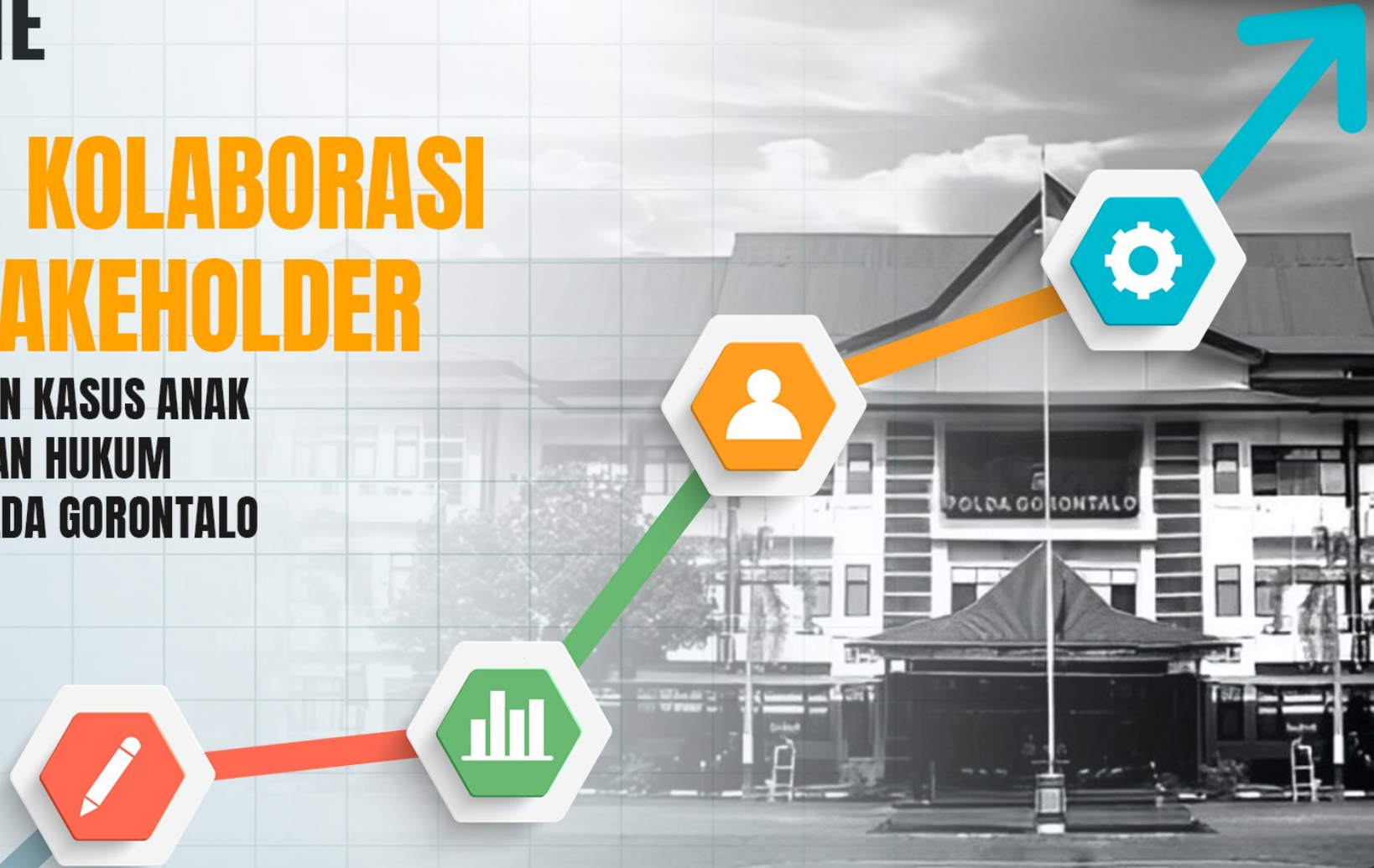
RENCANA STRATEGI MARKETING



MILESTONE

STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER

DALAM PENANGANAN KASUS ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DITRESKRIMUM POLDA GORONTALO



MILESTONE I

(Jangka Pendek)

Pembentukan Tim Efektif

Kegiatan awal dari implementasi proyek perubahan adalah pembentukan tim efektif/pokja dengan rangkaian tahapan sebagai berikut :

Konsultasi dengan mentor

Sebagai langkah awal pelaksanaan proyek perubahan, pada tanggal 9 September 2024 Project Leader menghadap Dirreskrim Polda Gorontalo Kombes Pol Nur Santiko, S.I.K, selaku Mentor melaporkan hasil proses pembelajaran classikal PKN Tingkat II, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan proyek perubahan serta memohon petunjuk dan arahan lebih lanjut tentang pelaksanaan proyek perubahan.



Konsultasi dengan mentor
(Kombes Pol Nur Santiko, S.I.K,)



Konsultasi dengan mentor
(Kombes Pol Nur Santiko, S.I.K,)

Rapat Pembentukan Tim Efektif

Langkah berikutnya mengadakan rapat untuk menyusun Surat Perintah Tim Efektif guna merumuskan rencana kerja dalam mencapai target yang telah dicanangkan baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang telah tertuang pada milestone pada tanggal 23 September 2023.

Pembentukan Tim Efektif dimaksudkan untuk Implementasi Learning Organization dalam Organisasi Proyek perubahan, melakukan Koordinasi, Problem Solving, Pembinaan dan Evaluasi untuk pencapaian Proyek Perubahan terutama dalam jangka pendek. Adapun hasil kegiatan ini adalah terbitnya Surat Perintah Dirreskrimum Polda Gorontalo Nomor: Sprin/213/IX/DIK.2.5./2024/Ditreskrimum tanggal 23 September 2024 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan.



Giat konsultasi dengan mentor dan tim efektif



Giat konsultasi dengan mentor dan rapat pembentukan tim efektif



Rapat tim efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO


SURAT PERINTAH
Nomor: Sp/pt/ J/2 JKMD/K.3.5/2024

Pertimbangan: bahwa dalam rangka Pelebaran Keperinteman Nasional (PKN) TK II T.A. 2024, maka memandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Nomor : 8789/VI/2023.5.02/24/Pedadm ke tanggal 30 Juli 2024 tentang penempatan peserta Pelebaran Keperinteman Nasional (PKN) TK II T.A. 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : **KOMDAS POL. NUR SANTIKO, S.I.K., M.H., NRP 78000774**
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA GORONTALO

Untuk : 1. & 8. sampai melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Koordinator peserta PKN TK II Angkatan XXXI Tahun Anggaran 2024 alias nama AKOP SARIFUL, M.H., NRP 77000303 jabatan Kabag Bin. Cagral Direktorat Kriminal Kota Gorontalo;
2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal diilakukan s.d. selesai;
3. melaksanakan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kota Gorontalo.

Salah: _____

Dibekukand: Gorontalo _____
September 2024
DAERAH GORONTALO


ASTUJANTO HASRI, M.H.
KORANAL POLDA GORONTALO

Tembusan:

1. Koptik;
2. Insanum Popti;
3. Keldandind Popti;
4. As SGM Koptik;
5. Wakapota Gorontalo;
6. Kapasimin Lendind Popti;
7. Kabidropda Popti Gorontalo.

Dikirimkan: _____
Cantikan Berapa _____
Cantikan Berapa _____

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAHAGIAN GORONTALO
DIREKTORAT RESESRER KRIMINAL ULUAM


SURAT PERINTAHAN
Nomor : Sp/PT/19/1006/K.2.5.2024/Direktim

Perimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan dinas maka dandung perlu mengeluarkan surat perintah ini

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Kapda Pusat Pendidikan Administrasi Nomor : B/56/VIK/2.5.2024/Pandemik tanggal 30 Juli 2024 tentang penempatan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TK.1.T.A. 2024.

DIPERINTAKAN

Kapada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN YANG TERLAMPIR DALAM SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping tugas dan tanggung jawab sebahaiak diunjuk untuk ini ekshif proyek perubahan pada pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 5 Angkatan 2024 Tahun Angkatan 2024
2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan ini, selekai;
3. melaksanakan tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapda Kota Gontalo.

Selekai:

Dikeluarkan di : Gorontalo
pada tanggal : 25 September 2024

DIREKTUR RESESRER KRIMINAL ULUAM POLDA GORONTALO


NUR SANTIKO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70000774

Tembusan :

1. Kapda Kota Gontalo.
2. Inwads Polda Gorontalo.
3. Kabidpropam Polda Gorontalo.

KEPOLISIAN NEGARA RI KABUPATEN GORONTALO
DINAS RAH KEBERSIHAN
DINERIN KEBERKAWANAN LINGKUNGAN

NOTULEN
HASIL RAPAT TIM EFEKTIF PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
PKR II ANGGARAN 2023/2024 DINERIN KEBERKAWANAN LINGKUNGAN

1. PEMBUKAAN

a. Acara dilaksanakan pada

1)	Hari/tanggal	Senin, 23 September 2024
2)	Tempat	09:00 – 11:00 WITA
3)	Pimpinan	Ruang Rapat Koordinasi Poldo Gorontalo
4)	Penyerta	Project leader
5)	Peserta	Sat Strediksum Poldo Gorontalo

b. Agenda pelaksanaan:
Pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Efektif dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan Proyek perubahan PKR II anggaran XXXI tahun 2024 di Poldo Gorontalo.

2. PEMBAHASAN

a. **PROJECT LEADER:**

- 1) Rapat pembentukan Tim ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas penyusunan proyek perubahan dengan judul "Strategi Kolaborasi Multi Stake Holder dalam penanganan Kasus Anak Berbahaya dengan Hukum di Kecamatan Poldo Gorontalo". Adapun yang menjadi alasan sehingga Project Leader mengangkat judul tersebut oleh karena aktualitas ini kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum jumlahnya semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas berdasarkan data yang ada dan aplikasi Simposi PPA sehingga hal ini perlu mendapat penanganan khusus dengan melibatkan stake holder terkait guna memaksimalkan proses peranganannya yang pada akhirnya akan mendapat penilaian positif dari masyarakat termasuk pihak-pihak terkait.
- 2) Dimohon bantuan dan kesediaan para personel yang terlibat agar dapat mendukung pelaksanaan proyek perubahan yang digagas oleh project leader demi terwujudnya yang diharapkan oleh organisasi poli.

b. **Penanggungjawab penyediaan ruang konsultasi (ANGGOTA TIM EFEKTIF):**

- 1) Dimohon bantuannya dalam mendukung ketersediaan ruang dalam menyajikan dan mengutar serta mendiskusikan sarana prasarana yang digunakan pada saat pelaksanaan konsultasi tim teknis

2) Mempersiapkan pengaturan tempat ruang konsultasi yang digunakan mengingat waktu pelaksanaan proyek perubahan hanya berlangsung 2 bulan saja,

c. Penanggungjawab penanganan laporan:

1. Bagi anggota yang ikut saat menerima laporan terkait ASH dapat didampingi oleh Pemula Piket sehingga memastikan bahwa laporan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku
2. Para Kasubid dan Karli dapat memberikan solusi tentang tindak lanjut laporan yang sudah diterima
3. Dapat membuat berita acara klarifikasi awal untuk diserahkan ke pimpinan guna mendapatkan petunjuk lanjut.

3. PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan Rapat tim efektif PKN II tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan masukan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Gorontalo, September 2024
PROJECT LEADER


BASUKI SIH MH
AKBP NRP 11000493



KEPOLAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT GENDARA
DIREKTORAT KEBERSIHAN, UMUM, DAN

NOTA DINAS
Korver: BMD – ACC/Kebersihan

Kepada : Yth. 1. Wakil Pemahaman Publik Gorontalo
2. Para Kepala Dinas/instansi Publik Gorontalo
3. Para Komando Distrik/instansi Publik Gorontalo
4. Para Kadet dan Para Sisdik Dinas/instansi Publik Gorontalo

Dari : Dinas/instansi Publik Gorontalo

Perihal : Wawasan Kerja Pemahaman Tim Etnis

1. Ringkasan :

- a. **Uraian** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Nasional Nomor : B/204/V/2013/2004/Produksi, tanggal 30 Juli 2014** tentang pengangkatan pejabat Kepolisian Kementerian Hukum (PKN) dan 1. JKS;
- c. **Selanjutnya dengan tujuan** untuk **menyusun dan melaksanakan** rencana **kegiatan** yang akan dilaksanakan **tim etnis** yang **terdapat** dalam **nama ANSP SARUKA, S/4, W/4, pada** **pendirian** **pusat** **keperawatan** **Nasional Tingkat 1** **Angkatan** **KORPRI Angkatan** **2014**;

Agak **berikut** **peran** **diambil** **dari** **uraian** **di** **pada** :

- Isi/1 Terbilang** : **Berdasarkan** **20** **September** **2014**
- Pukul** : **05.00 WITA** **dan** **Selanjut**
- Tempat** : **Ruang** **Rekrutmen** **Dinas/instansi** **Publik** **Gorontalo**

2. Deskripsi **untuk** **mengetahui** **hal-hal** **dan** **bagaimana** **yang** **di** **lakukan** **dan** **hasil** **nya** **adalah** :

Gorontalo, 3-5 September 2014
DIREKTORAT POLDA GORONTALO



NUR SANTIKO, S.I.H.
KOMANDIR BERSAS POLDA NPP 7007074

[illegible]

1	2	3	4	5
10	GHAN NEO LATIF, S.H	BIRUNA RUMAH	SA DE CENYIKASI	ANGGOTA
17	BONI AHMAD AZHUA	BRUMAS RUMAH	SA DE CENYIKASI	ANGGOTA

Disiapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 13
DIREKTUR RESEDER KOMAR UMUM POLDA GORONTALO

September 2004

Tembusan :

1. Kasubid Gorontalo
2. Pemasok Prita Gorontalo
3. Kalidagrum Prita Gorontalo

AIR SANTOL, TULU, M.H
KOMANDIR BILAT POLRES NNO 7000774

Spring

Notulen

Nota Dinas

Daftar Nama Tim Efektif

KUNJUNGAN KOORDINASI KE STAKEHOLDER Eksternal



konsultasi dan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Gorontalo



konsultasi dan koordinasi dengan Kejati Gorontalo



konsultasi dan koordinasi dengan Lapas Gorontalo



konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Internal



Dokumen Pendukung Stakeholder Eksternal



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL
Jalan Ronggo Pura No. 101, Kelurahan Ronggo Pura, Kecamatan Ronggo Pura, Kota Gorontalo
Kode Pos 96111
Telp. (0902) 8211111
Fax. (0902) 8211111
Email: info@gorontalo.go.id

SURAT DUKUNGAN
Nomor: ASD/309005/1913/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sugila Haridiana, ST MM
NIP : 197104031982120008
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

Dengan ini memberikan dukungan Proses dan Penyelesaian Proper Kepada:
AKBP SAHRUL, S.H., M.H.

Dengan judul "STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITRESKORUMIN POLDA GORONTALO"

Demiikian surat dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 September 2024
KEZILAHIRAN
SAHRUL, S.H., M.H.
PENINGGAH UTAMA MUDA
NIP. 197104031982120008

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
Jl. Pemuda No. 1, Kelurahan Ronggo Pura, Kecamatan Ronggo Pura, Kota Gorontalo
Kode Pos 96111
Telp. (0902) 8211111
Fax. (0902) 8211111
Email: info@jaksa.go.id

SURAT DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : DR. RAMDHAN KASIM, S.H., M.H., C.T.L.
Pangkat/NIP : JAKSA UTAMA PRATAMA/1970718 19803 1 001
Jabatan : Kepala Pengawasan Advokat Indonesia (PERADI) Provinsi Gorontalo
Alamat : Jl. Kiri Raut Msa, Kelurahan Kayubulan, Kari, Limbisa, Gorontalo

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan proses dan penyelesaian proper :
Nama : AKBP SAHRUL, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala sama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo dengan Stakeholder dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum.

Demiikian surat ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 September 2024
DPC PERADI GORONTALO
KASIM
RAMDHAN KASIM, S.H., M.H., C.T.L.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 1970718 19803 1 001

PERADI
DIWAN PEMIMPIN CARANG PERADI GORONTALO
Alamat Kantor : Jalan Kiri Raut Msa, Kayubulan, Limbisa, Gorontalo

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Nomor : SP/30.3/Peradi/KTM/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : DR. RAMDHAN KASIM, S.H., M.H., C.T.L.
Jabatan : Kepala Pengawasan Advokat Indonesia (PERADI) Provinsi Gorontalo
Alamat : Jl. Kiri Raut Msa, Kelurahan Kayubulan, Kari, Limbisa, Gorontalo

Dengan ini menyatakan memberikan dukungan proses dan penyelesaian proper :
Nama : AKBP SAHRUL, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala sama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo dengan Stakeholder dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum.

Demiikian surat ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 September 2024
DPC PERADI GORONTALO
KASIM
RAMDHAN KASIM, S.H., M.H., C.T.L.

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ronggo Pura No. 101, Kelurahan Ronggo Pura, Kecamatan Ronggo Pura, Kota Gorontalo
Kode Pos 96111
Telp. (0902) 8211111
Fax. (0902) 8211111
Email: info@gorontalo.go.id

SURAT DUKUNGAN
Nomor : 100.2/DP/10/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. Yana Yana Sulman, S.H., M.H.
NIP : 197001012000032010
Jabatan : Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo

Dengan ini memberikan dukungan Proses dan Penyelesaian Proper Kepada:
AKBP SAHRUL, S.H., M.H.

Dengan judul "STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITRESKORUMIN POLDA GORONTALO"

Demiikian surat dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,
Dr. Yana Yana Sulman, S.H., M.H.
PENINGGAH UTAMA MUDA (P.U.M.)
NIP. 197001012000032010

MAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DEKRETUAT JERIDAR BADA PERADAR UNYU
PERADAR TINGGI GORONTALO
Jalan Ronggo Pura No. 101, Kelurahan Ronggo Pura, Kecamatan Ronggo Pura, Kota Gorontalo
Kode Pos 96111
Telp. (0902) 8211111
Fax. (0902) 8211111
Email: info@jaksa.go.id

SURAT DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ahmad Petai SE, S.H., M.H.
NIP : 197041012000031003
Jabatan : Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo

Dengan ini memberikan dukungan Proses dan Penyelesaian Proper Kepada:
AKBP SAHRUL, S.H., M.H.

Dengan judul "Strategi Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Disekorumen Polda Gorontalo".

Demiikian surat dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Oktober 2024
Keta,
Ahmad Petai SE, S.H., M.H.
NIP. 197041012000031003

Internal

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR SP/30.3/2024/RESOR GORONTALO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : DEDY HERMANNA, S.I.K., M.K.P.
Pangkat : AKBP
Jabatan : KAPOLRES GORONTALO
Instansi : POLDA GORONTALO

Dengan ini mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan dengan judul "Strategi Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Disekorumen Polda Gorontalo" yang dibuat oleh personel Polda Gorontalo dalam rangka PKN TK II Angkatan XXXI di Pusdiklat Polt Gede Bage Provinsi Bandang Tahun Anggaran 2024, atas nama Project Leader:

Nama : SAHRUL, S.H., M.H.
Pangkat : AKBP
NIP : 71050483
Jabatan : Kabag Binopsial
Instansi : Disetrum Polda Gorontalo

Demiikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 September 2024
KAPOLRES GORONTALO
DEDY HERMANNA, S.I.K., M.K.P.
AKBP NIP. 71050483

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR SP/30.3/2024/RESOR UTARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ANDIK GUNWANA, S.I.K.
Pangkat : AKBP
Jabatan : KAPOLRES GORONTALO UTARA
Instansi : POLDA GORONTALO

Dengan ini mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan dengan judul "Strategi Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Disekorumen Polda Gorontalo" yang dibuat oleh personel Polda Gorontalo dalam rangka PKN TK II Angkatan XXXI di Pusdiklat Polt Gede Bage Provinsi Bandang Tahun Anggaran 2024, atas nama Project Leader:

Nama : SAHRUL, S.H., M.H.
Pangkat : AKBP
NIP : 71050483
Jabatan : Kabag Binopsial Disetrum
Instansi : Polda Gorontalo

Demiikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 September 2024
KAPOLRES GORONTALO UTARA
ANDIK GUNWANA, S.I.K.
AKBP NIP. 71050483

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POKHAWATO

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR SP/30.3/2024/RESOR POKHAWATO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : WINDYNO, S.H., S.I.K.
Pangkat : AKBP
Jabatan : KAPOLRES POKHAWATO
Instansi : POLDA GORONTALO

Dengan ini mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan dengan judul "Strategi Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Disekorumen Polda Gorontalo" yang dibuat oleh personel Polda Gorontalo dalam rangka PKN TK II Angkatan XXXI di Pusdiklat Polt Gede Bage Provinsi Bandang Tahun Anggaran 2024, atas nama Project Leader:

Nama : SAHRUL, S.H., M.H.
Pangkat : AKBP
NIP : 71050483
Jabatan : Kabag Binopsial Disetrum
Instansi : Polda Gorontalo

Demiikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 September 2024
KAPOLRES POKHAWATO
WINDYNO, S.H., S.I.K.
AKBP NIP. 71050483

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOLAMBO

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
NOMOR SP/30.3/2024/RESOR KOLAMBO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : SITI RAHAYU, S.I.K.
Pangkat : AKBP
Jabatan : KAPOLRES KOLAMBO
Instansi : POLDA GORONTALO

Dengan ini mendukung sepenuhnya Proyek Perubahan dengan judul "Strategi Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Disekorumen Polda Gorontalo" yang dibuat oleh personel Polda Gorontalo dalam rangka PKN TK II Angkatan XXXI di Pusdiklat Polt Gede Bage Provinsi Bandang Tahun Anggaran 2024, atas nama Project Leader:

Nama : SAHRUL, S.H., M.H.
Pangkat : AKBP
NIP : 71050483
Jabatan : Kabag Binopsial Disetrum
Instansi : Polda Gorontalo

Demiikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 September 2024
KAPOLRES KOLAMBO
SITI RAHAYU, S.I.K.
AKBP NIP. 71050483

MILESTONE II

(Jangka Pendek)

Data kasus ABH



CRIME TOTAL & CRIME CLEARANCE SUBDIT IV RENAKTA TAHUN 2021 s.d. 2023



REKAP CRIME TOTAL DAN CRIME CLEARANCE SUBDIT IV DITRESKRIM POLDA GORONTALO
PERIODE TAHUN 2021 S.D. 2024 (TGL 7 NOV 2024)

JENIS KEJAHATAN	2021		2022		2023		2024		TOTAL	
	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
Penganiayaan thdp anak	4	2	1	1	5	0	5	5	15	8
Pencabulan thdp anak	5	3	5	3	7	5	9	4	26	15
Persetubuhan thdp anak	9	3	12	5	14	12	12	9	47	29
Kekerasan psikis thdp anak	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Penelantaran thdp anak	1	0	0	1	2	0	0	1	3	2
Kdrt (fisik)	8	10	9	1	16	14	11	14	44	39
Kdrt (psikis)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Kdrt (penelantaran)	6	0	3	1	4	3	4	3	17	7
TPKS	0	0	0	0	5	0	8	7	13	7
Aborsi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
TPPO	0	0	1	0	5	2	1	3	7	5
Asal usul perkawinan	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Kesustilaan	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Keterangan palsu pada akta otentik	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Salam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Perkosaan	2	0	0	1	0	0	2	0	4	1
Pencurian	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Pengerojukan	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1
Penganiayaan	7	3	3	0	13	9	6	7	29	19
Perzinahan	7	5	1	1	4	3	9	5	21	14
Curanmor R2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Kejahatan thdp kemerdekaan orang	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Bawa lari perempuan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
Penipuan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Penghinan	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
Pencemaran nama baik	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
TOTAL	55	26	37	15	81	53	70	59	243	153

I. Tahun 2021

- Crime Total : 55 kasus
- Crime Clearance: 26 kasus
- Persentase : 47 %

II. Tahun 2022

- Crime Total : 37 kasus
- Crime Clearance: 15 kasus
- Persentase : 41 %

III. Tahun 2023

- Crime Total : 81 kasus
- Crime Clearance: 53 kasus
- Persentase : 65 %

MILESTONE III

(Jangka Pendek)

FGD (Forum Group Discussion)

Dukungan stakeholder /pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam suksesnya sebuah proyek perubahan, karena tanpa dukungan stakeholder proyek perubahan akan terhambat. Kegiatan dilakukan mulai tanggal 9 s.d 19 Oktober 2023 baik dukungan secara verbal maupun melalui penandatanganan form dukungan. Tahapan kegiatan melalui laporan, koordinasi dan konsultasi dengan seluruh stakeholder /pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yaitu :

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder internal Dirreskrimum Polda Gorontalo
Tanggal Oktober 2024 Project Leader laporan, konsultasi dan meminta dukungan kepada Dirreskrimum Polda Gorontalo Gorontalo. Tujuannya untuk meminta saran, masukan dan dukungan terkait implementasi proyek perubahan yang sedang dibuat oleh Project Leader. Dirreskrimum Polda Gorontalo selaku pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Project Leader.



Pemaparan hasil pemetaan
kasus ABH



Pemaparan hasil pemetaan
kasus ABH



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN

FOCUS GROUP DISCUSSION SEBAGAI IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
DENGAN JUDUL STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER DALAM
PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITRESKRIMUM
POLDA GORONTALO



Dibuat dengan
Canva



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION DENGAN JUDUL "STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITRESKRIMUM POLDA GORONTALO"

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

- Bahwa tugas dan wewenang penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak pidana wajib dilaksanakan secara profesional, proporsional, prosedural, transparan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia guna terwujudnya kepastian hukum;
- Bahwa untuk menjamin terwujudnya profesionalisme, kepastian hukum dan terciptanya rasa keadilan masyarakat, diperlukan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja penyidik dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan guna menegakkan/menghimpit terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa untuk mencapai hasil pengawasan penyidikan yang objektif dan akurat, perlu dilaksanakan sistem pengawasan internal secara berjenjang oleh atasan penyidik dan pemberian fungsi pengawasan di bidang penyidikan.

2. Dasar

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Surat Perintah Kapoti Nomor: Sprin 191/SV/02/K.2.5/2024/Pudikrim.1 tanggal 24 Juli 2024 tentang Daftar Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
- Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Nomor:

Dibuat dengan
Canva

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan laporan hasil pelaksanaan Focus Group Discussion adalah sebagai bahan laporan dan masukan bagi project Leader dalam rangka penyusunan SOP tentang penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum diwilayah Provinsi Gorontalo serta bagian dalam penyusunan proyek perubahan dengan judul Strategi Kolaborasi Multi Stakeholder dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum Ditreskrim Polda Gorontalo. Tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan kinerja ditreskrim Polda Gorontalo dengan Multi stakeholder melalui pelayanan terpadu dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum diwilayah Provinsi Gorontalo.

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat

- Hari/Tanggal : Jumat / 25 Oktober 2024
- Tempat : Mama Caffe & Bakery Kel Moodu Kota Timur Kota Gorontalo

2. Peserta FGD

- Kegiatan FGD diikuti Oleh Stakeholder terkait yakni Dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Dinas DP3A, Pekerja Sosial se provinsi Gorontalo, Pekerja Kemasyarakatan PK Bapas Kelas II provinsi Gorontalo serta Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Gorontalo
- Abdo Sahru, S.H, M.H kabag Binasopsal Ditreskrim Polda Gorontalo sekaligus sebagai Project Leader
- Susunan Acara
 - Pembukaan oleh MC
 - Lagu Indonesia Raya
 - Doa
 - Sambutan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sekaligus membuka acara Focus Group Discussion.
 - Materi dan tanya jawab

III. NARA SUMBER

- Kepala Dinas Provinsi Gorontalo Ibu Sagita Wartabone, ST, MM
- Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo Nur Santiko, S.IK, MH
- Kepala PK Bapas Kelas II Gorontalo Agus Ridianto, S.H, MH
- Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo diwakili Kaspidium Viktor Raymond Yusuf, S.H, MH
- Kabid PSA Provinsi Gorontalo Ibu Fatma B.Ki

Dibuat dengan
Canva

Dokumen Pendukung FGD (Forum Group Discussion)

MATERI PRESENTASI DAN FOCUS GROUP DISCUSSION

Judul "STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER DALAM PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITRESKRIMUM POLDA GORONTALO"

Beberapa hal yang menjadi fokus bahasan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yakni:

- Penyampaian masalah dengan dukungan data dari masing-masing stakeholder
 - Data kasus ABH tahun 2021 s/d 2023
 - Bahwa kasus tersebut naik secara signifikan sehingga perlu ada solusi segera dalam penanganannya dan butuh bantuan dari berbagai pihak.
- Penjelasan alternatif pemecahan masalah dengan menyesuaikan lingkup kerja dan kewenangan masing-masing stakeholder
 - Usulkan alternatif solusi
 - Tawarkan apakah stakeholder sepadan dengan usulan solusi sesuai kewenangan dan ruang lingkup masing-masing.
- Analisa kelebihan dan kelemahan alternatif pemecahan masalah dari masing-masing stakeholder
 - Tentukan mitigasi dan solusi yang akan dilakukan dan hambatan-hambatannya.
- Apa rekomendasi solusi yang paling efektif berdasarkan analisis alternatif pemecahan masalah.
- Apa langkah yang tepat untuk dijadikan sebagai langkah perubahan dengan menetapkan alokasi sumber daya baik dari personil, dana maupun jadwal proyek perubahan (jangka menengah dan panjang).

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Abdo Sahru

Dibuat dengan
Canva

dalam penanganan kasus ABH

- Agus Ridianto, S.H, M.H Kepala Bapas Kelas II Gorontalo dengan judul materi "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum sesuai UU No.11 Tahun 2012 tentang UUSPA

Tugas Bapas adalah Pembimbingan yang meliputi:

- Pendampingan
- Pembimbingan
- Pengawasan
- Litmas
- Sidang TPP

Bapas Gorontalo adalah satu-satunya Bapas yang ada di Provinsi Gorontalo dengan wilayah kerja meliputi seluruh provinsi Gorontalo dengan rincian 1 Kota, 5 Kabupaten dengan wilayah hukum 1 Polda, 6 Polres dan seluruh polisi yang ada dibawahnya, 6 Kejaksaan dan 4 Pengadilan Negeri.

- Viktor Raymond Yusuf, S.H, M.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo membawakan materi tentang Mekanisme Penuntutan Perkara ABH dengan point-point sebagai berikut:

- Kasus Anak perlakuannya khusus
- Pelaku anak tidak ditahan karena waktunya singkat, itu hanya bisa menahan 5 hari plus pengawasan 5 hari
- Perlu koordinasi dalam pelaksanaan eksekusi dan rehab sehingga tidak terjadi pemasalah baru khususnya jika status anak sebagai sipan di LPKS
- Perlu buat Group untuk kasus ABH sehingga memudahkan dalam koordinasi dengan stakeholder.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan adanya pelaksanaan Focus Group Discussion ini diharapkan kedepan dalam penanganan kasus khususnya ABH dapat berjalan dengan lancar dan masing-masing stakeholder memahami tupaksinya sehingga kepatungan terbaik bagi anak dapat diwujudkan bukan semata-mata dengan penegakan hukum tetapi dapat dengan Restoratif Justice ataupun Diversi.

2. Rencana tindak lanjut

- Kedepan perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari masing-masing stakeholder.

Dibuat dengan
Canva

IV. MATERI

- Ibu Sagita Wartabone, ST, MM tentang Peran Dinsos dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum :

- Giat tersebut adalah mulai karena membahas masalah anak sebagai masa depan bangsa yang harus diberi perhatian khusus dan penanganan secara khusus pula
- FGD ini sebagai bagian untuk kita meninjau tugas-tugas kita apakah sudah sesuai atau perlu perbaikan kedepan.
- Perifundung terhadap anak perlu dimulai dari awal sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- Penyelesaian perkara melalui Restoratif Justice harus dikependarkan demi menjaga masa depan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

- Nur Santiko, S.IK, MH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum menjelaskan tentang bagaimana tata cara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Ditreskrim Polda Gorontalo diantaranya:

a. Latar Belakang

- Gakum yang dilaksanakan Poli terhdp ABH seringkali mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat.
- Adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum terhadap ABH
- Diperlukan Upaya-upaya guna meningkatkan profesionalisme Poli dalam penanganan ABH

b. Permasalahan adalah:

- Bagaimana penegakkan hukum dalam penanganan kasus an yang berhadapan dengan hukum pada Ditreskrim Polda Gorontalo
- Kasus ABH meningkat Apa yang salah?
- Bagaimana prosedur penanganan kasus ABH

c. Poltek-pokok persoalan

- Bagaimana kondisi SDO dalam sidik ABH
- Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum terhadap ABH
- Bagaimana mekanisme sidik terhadap ABH
- Ruang Lingkup
 - Tindak pidana yang melibatkan ABH sebagai tersangka meliputi kasus pencurian kendaraan bermotor, pencabulan, penganiayaan pengorokan
 - Bagaimana strategi untuk jangka pendek, menengah dan panjang

Dibuat dengan
Canva

Gorontalo, 25 Oktober 2024
KABAGINEROPSAL DITRESKRIMUM
SELAMU
PROJECT LEADER

Abdo Sahru
ABDO SAHRU, S.H, M.H
KABAGINEROPSAL DITRESKRIMUM

Dibuat dengan
Canva

MILESTONE IV

(Jangka Pendek)

Pembentukan SOP Pelayanan Dalam Penanganan Kasus ABH

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Tim Efektif tentang penyusunan mekanisme penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan draft Keputusan Dirreskrimum Polda Gorontalo meliputi:

- 1) Penyusunan SOP mekanisme penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sampai berupa draft Keputusan Dirreskrimum Polda Gorontalo antara lain memuat :
 - (a) Dasar hukum,
 - (b) Asas hukum
 - (c) Pengertian – pengertian
 - (d) Tahapan persiapan
 - (e) Proses Pelaporan;
 - (f) Proses penyelidikan dan penyidikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tingkat Polda; dan
 - (g) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan kasus tersebut.



Pernangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) TKS Angkatan XXXII TA 2024

5. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dan tujuan pemberian laporan hasil pelaksanaan Resensi SOP adalah sebagai bahan laporan dan masukan bagi tingkat Lentera dalam rangka penyusunan SOP tentang penanganan kasus anak berkehadapan dengan hukum di lingkungan Provinsi Gorontalo sebagai bagian dalam program kerja pemerintah dengan asosiasi Sekolah Kolaborasi Muli. Stakeholder dalam penanganan kasus anak berkehadapan dengan hukum di lingkungan Provinsi Gorontalo secara umum adalah unsur pemerintahan. Kinerja dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Muli stakeholder melalui pelayanan terpadu dalam penanganan anak berkehadapan dengan hukum dialykan Provinsi Gorontalo.

PELAKSANAAN

a. Waktu dan Tempat

- 1. Hari/Tanggal : Jumat / 8 Desember 2024
- 2. Tempat : Aula Tinepo Pinda Gorontalo

b. Peserta / Sasaran

- 1. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh Para kasi dan kasi rekam pates jipran
- 2. Anggota Direktorat Pinda Gorontalo

c. Susunan Acara

- 1. Pembukaan oleh MC
- 2. Laporan Indonesia RI
- 3. Diskusi
- 4. Penutupan Direktorat Pinda Gorontalo sekaligus membuka acara sosialisasi SOP Penanganan Kasus Anak Berkehadapan dengan Hukum di lingkungan Provinsi Gorontalo
- 5. Diskusi dan tanya jawab

d. Pemapar

- 1. Direktur Reserse Kriminal Umum Pinda Gorontalo Nur Syantik S.IK, MH
- 2. Kabag Inersenal Direktorat Pinda Gorontalo
- 3. Kasudat Rapi Hukum Bidan Pinda Gorontalo

VI. HASIL

a. **Nur Syantik S.IK, MH** selaku Direktur Reserse Kriminal Umum memaparkan tentang bagaimana tata cara penanganan anak yang berkehadapan dengan hukum di lingkungan Provinsi Gorontalo diantaranya,

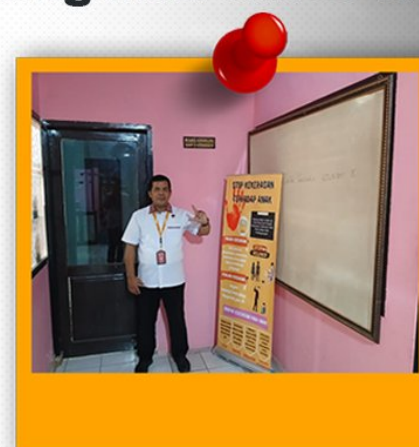
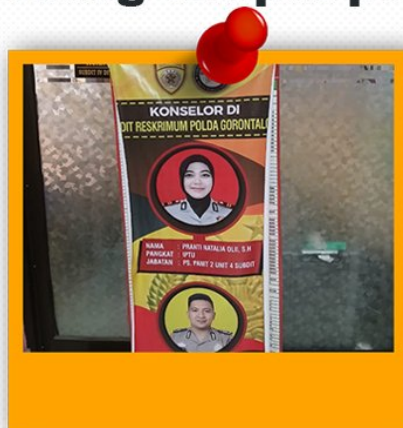
- 1. Lari Belakang

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

MILESTONE V

(Jangka Pendek)

Ruang tempat pelayanan konseling penanganan kasus ABH



MILESTONE VI

(Jangka Pendek)

SOSIALISASI PROYEK PERUBAHAN





Kesadaran diri adalah mengidentifikasi penyelesaian yang merupakan disiplin dan pemeliharaan hukum atau kebiasaan.

4) **Kemampuan** Kemampuan adalah kemampuan pribadi untuk melaksanakan proses hukum untuk melindungi reputasi dan masa depan mereka.

5) **Akses** Akses adalah layanan hukum, adalah akses harus mendapatkan akses yang memadai terhadap penakut hukum dan layanan legal.

a) **Persepsi anak** terhadap dengan hukum dan peraturan disingkat ABH adalah anak yang berhubungan dengan hukum merupakan anak yang memiliki kemampuan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tidak pidana.

b) **Dipertukan** strategi dari model stakeholder dalam penanganan kasus ABH untuk memastikan perlindungan dan rehabilitasi anak. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) **Pengpadatan dan Penyisihan**
 - Pengpadatan dapat dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang mengetahui adanya kasus.
 - Penyisihan adalah pengalihan kasus dari pihak keluarga atau lembaga perlindungan anak.
- 2) **Sertifikasi** sertifikasi pengaduan, penyidik, penyidik pembantu, dan tim khusus penanganan kasus ABH, dan pihak yang berkaitan dengan kasus anak dan keluarganya.
- 3) **Melakukan** evaluasi terhadap kondisi fisik anak dan mental anak.
- 4) **Menyediakan** tidak ada tindakan kekerasan atau penahanan berdasar dugaan proses hukum.

2) **Perlindungan Anak**

Memperoleh anak dilindungi yang aman dan sesuai, dalam ABH sangat penting untuk melindungi pemenuhan hak-hak mereka. Beberapa langkah yang dapat di ambil antara lain dapat melakukan anak dan lingkungan yang beresiko, memberikan akses ke program pendidikan, perawatan kesehatan untuk membantu mengatasi trauma, dan memastikan pemenuhan kebutuhan anak dalam proses rehabilitasi yang mengabaikan keterampilan hidup, mengatasi konflik dan membangun kepercayaan diri, melibatkan keluarga dalam proses pemulihan, dan memastikan pemenuhan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan anak.

3) **Menyediakan dukungan psikologis**

Dukungan psikologis dalam kasus ABH meliputi, pendekatan berbasis normalisasi, dukungan kelompok, terapi individu, dan mendukung individu dengan sensitif dan penuh perhatian dalam proses pemulihan.

4) **Perawatan Holistik** Perawatan holistik oleh penegakan hukum lembaga bantuan hukum yang berpengalaman dalam masalah hukum anak.

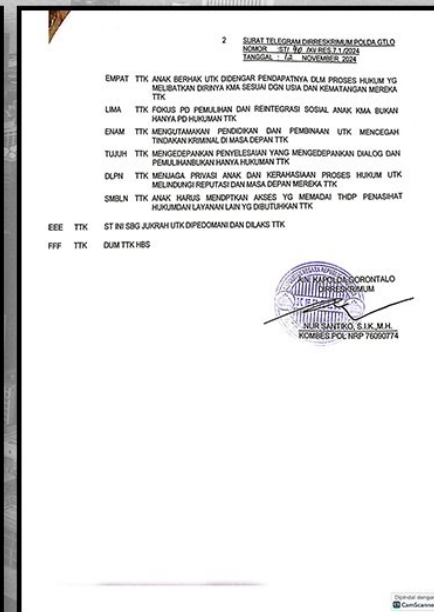
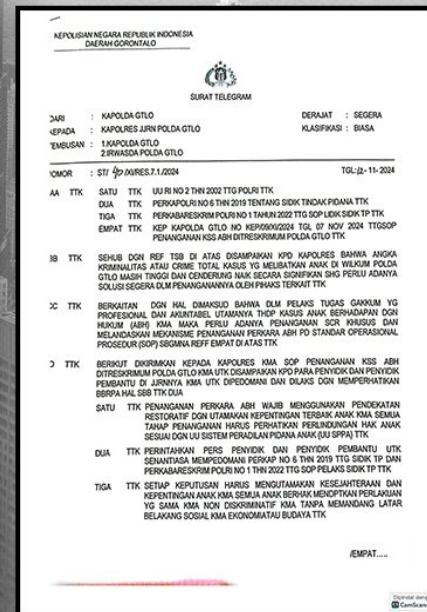
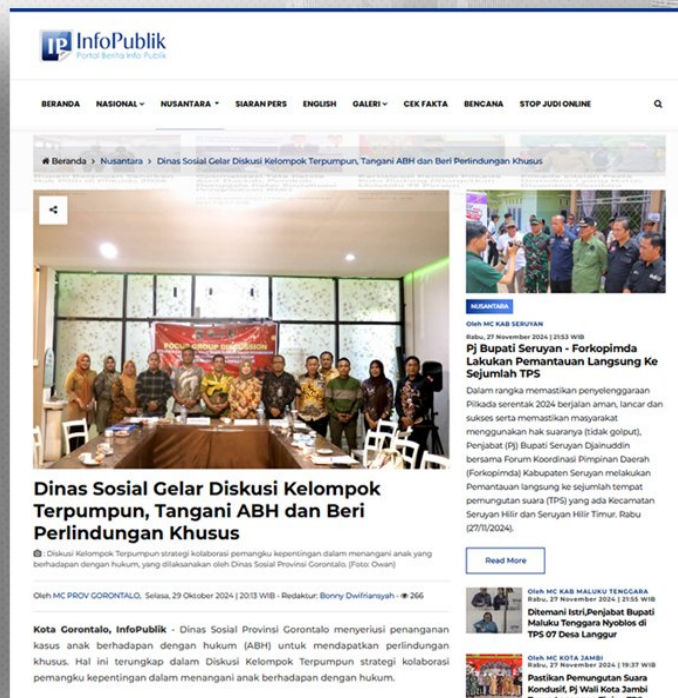
5) **Proses hukum terhadap anak** Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk melindungi anak anak. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tersebut:

- 1) **Identifikasi** ABH biasanya dimulai dengan pelaporan ke pihak berwenang, seperti kepolisian, oleh korban, saksi atau pihak lain.

- a. Pelaksanaan supervisi dan sosialisasi di Sateran Poles Bojone dan Poles Ponorogo dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2020, dimulai pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB, dihadiri oleh 10 orang perwakilan dari Kabupaten Gresik dan Kabupaten Ponorogo, perwakilan anggota Sateran Poles Bojone dan Ponorogo.
- b. Terkat dengan urusan kegiatan sosialisasi di Sateran Poles Bojone dan Poles Ponorogo dapat dijadikan sebagai:
- a) Kebutuhan pengabdian masyarakat (KSP) Sahel, SH.MH., memberikan penjelasan terkait standar operasional prosedur atau SOP penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pemuda Gorontalo dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:
- a) Balwa standar operasional prosedur penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum telah diterbitkan oleh Kapolda Gorontalo dengan Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor KEP/931/2024 tanggal 7 November 2024 tentang SOP. Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Ditirkekanrum Poda Gorontalo.
- b) Ditirkekanrum Poda Gorontalo sebagai salah satu profesional dan akuntabel sebagai terhadapan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

PUBLIKASI

Sosialisasi dan Jukra Kejajaran Terkait Penanganan ABH



1

**Pelaksanaan Layanan
Pusat kritis**



2

Patroli Cyber



3

**Monitoring dan
Evaluasi Pelayanan**



4

Pengembangan Kolaborasi



KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN JANGKA MENENGAH

KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN JANGKA PANJANG

Kordinasi stakeholder terkait rekomendasi
pengajuan ren aksi pelayanan
penanganan kasus ABH

1

Diskusi regulasi penanganan ABH
di wilayah Kab/Kota

2

Audensi dengan Pemda/Dinsos

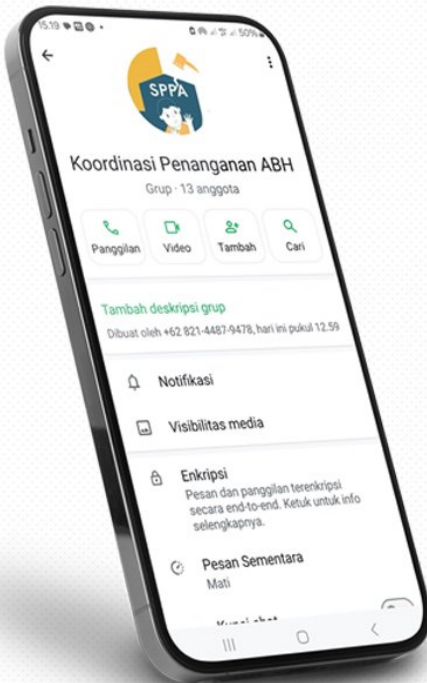
3

Perencanaan penerapan pelayanan
kasus ABH ditingkatkan Nasional

4



Dokumen Pendukung jangka panjang keberlanjutan proyek perubahan



KESEPAKATAN BERSAMA RENCANA AKSI STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKE HOLDER DALAM PENANGANAN KASUS ANAK BERHAJAPAN DENGAN HUKUM DI PROVINSI GORONTALO			
NO	NAMA INSTANSI	REAKSI	SASARAN
I	DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO	- Membuka Help Desk Aduan ABH - Menyediakan Tempat Rehab Anak Bermasalah Hukum - Pendampingan Peksu terhadap Anak Bermasalah Hukum - Memastikan Pemenuhan Hak Dasar Anak Bermasalah Hukum	- Anak Bermasalah Hukum - Pekerja Sosial - Tayasan yang menangani Anak bermasalah Hukum
II	KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO	- Membentuk Satuan Penanganan ABH - Koordinasi dengan Dinas Anak Bermasalah Hukum - Menyediakan Produk Hukum terkait Penanganan Anak Bermasalah Hukum melalui lembaga - lembaga Formal dan Non formal - Peningkatan SDM - Peningkatan SAPRAS - Penyusunan Metode Baru Yang Komprehensif	- Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal - Lembaga Penyelenggara Perindungan Anak
III	KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO	- Prinsip Perindungan Anak - Kekjasama akan menegaskan bahwa dalam menangani kasus yang melibatkan anak, harus memprioritaskan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Konvensi Hak Anak. Penanganan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. - Peran Jaka sebagai Pemontor Umum: Jaka diharapkan tidak hanya menjalankan peran sebagai pemontor umum, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui cara-cara yang tidak merugikan masa depan anak. Jaka juga harus mempertimbangkan untuk tidak menuntut pidana maksimal bagi anak, melainkan menekankan pada rehabilitasi	- Dinas Terkait - Lembaga Penyelenggara Perindungan Anak

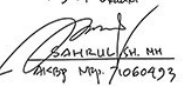
Dipindai dengan CamScanner

IV BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II GORONTALO			
	- Membentuk Pokmas Ulap Peduli Kemasyarakatan - Pemberdayaan Klien Pemasyarakatan - Pendampingan, Penelitian Kemasyarakatan, Membimbing, Mengawasi ABH yang berdasar Keputusan Hakim - Memberikan Bantuan Sosial Keluarga Klien Anak yang membutuhkan - Peningkatan SDM	- Anak Bermasalah Hukum - Klien	

UNSUR DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO	UNSUR KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO	UNSUR KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO	UNSUR KEMENTERIAN ININGRASI DAN PEMASYARAKATAN GORONTALO
 NUR CHANTICO SYAH KEP. NEP 76090774	 NUR CHANTICO SYAH KEP. NEP 76090774	 NUR CHANTICO SYAH KEP. NEP 76090774	 NUR CHANTICO SYAH KEP. NEP 76090774

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR FOCUS GROUP DISCUSSION STRATEGI KOLABORASI MULTI STAKE HOLDER DALAM PENANGANAN KASUS ANAK BERHAJAPAN DENGAN HUKUM DIREKSIHUM POLDA GORONTALO				
NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	REK
1	WIR SANTO	DIREKSIHUM	PADA	✓
2	Chantico	Kep. NEP	Dinas Pro	✓
3	Reza R.	REKAS GTO	BPKAS	✓
4	Tahar A.L.	Kep. NEP	Hukum	✓
5	Reza R.	Kep. NEP	Hukum	✓
6	Wahyuni	Kep. NEP	Hukum	✓
7	Yusuf Wastono	IN. SUBST. IV	Polda	✓
8	Dyanita Marini	Pada Sub IV	Polda	✓
9	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
10	Wahyuni	Re. NEP	Polda	✓
11	Shahy Purnama	Pada Sub IV	Dinas Pro	✓
12	Nur Chantico	Pada Sub IV	Dinas Pro	✓
13	Udang B.	Pada Sub IV	Dinas Pro	✓
14	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
15	Wahyuni	Re. NEP	Polda	✓
16	Wahyuni	Re. NEP	Polda	✓
17	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
18	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
19	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
20	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
21	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
22	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
23	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
24	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓
25	Reza R.	Re. NEP	Polda	✓

Gorontalo, 25-10-2024
 Mengetahui
 Project Leader

 SAHAUL W. M.
 NIK. 7060993

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMEN PENDUKUNG JANGKA PANJANG



[illegible]

LAN RI

**ASN
BERPIJAK**

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersambikan
sertifikat ini kepada:

SAHRUL

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Pelatihan Struktural Kepemimpinan - Resiliensi Diri (Self Resilience) (3 DP)

Jakarta, 8 Agustus 2024

Muhammad Taufiq
Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
Kompetensi ASN

ASN.BERPIJAK.ID

KESIMPULAN

Proyek perubahan "Strategi Kolaborasi Multi Stakeholder dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan Hukum Ditreskrim Polda Gorontalo" bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polri dan stakeholder semakin meningkat. Dalam jangka pendek, komitmen kerjasama telah dibangun, pemetaan kasus ABH dilakukan, dan layanan pendampingan didirikan. Pada jangka menengah, fokus pada pengembangan sistem patroli cyber dan pendampingan rutin. Kemudian pada jangka panjang mencakup rekomendasi regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengurangan kasus Abh. Manfaatnya meliputi peran positif stakeholder, sinergi, dan pelayanan pusat kritis.





PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ANGKATAN XXXI,
KEMASDIKMIN LEMDIKLAT POL

Bandung 2024



Thank You



REPUBLIK INDONESIA

PKN II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024